

Potret Diplomasi Turki Menuju Keanggotaan Tetap Uni Eropa

M. Sya'roni Rofii

Mahasiswa Doktoral pada Marmara University Turkey

Abstract:

Turki had been utilized various instrument to convince European Union regarding their commitment to meet all the standards required by EU. So far, Turkey had maximized their diplomatic ways to mold its national image in a better shape compared to Turkey's national image ten years before. Now, still with diplomatic approach, Turkey strive to create an international image as one of the key actors in the Middle East that actively involved in the strategic issues in the region

Keywords: Turkey, EU, Diplomacy, National Image

Abstrak:

Turki menggunakan berbagai instrument untuk mampu meyakinkan pihak Uni Eropa terkait komitmen mereka untuk memenuhi semua standar yang telah ditetapkan oleh UE. Sejauh ini Turki memaksimalkan langkah-langkah diplomasi untuk memastikan citra Turki jauh lebih baik dibandingkan sepuluh tahun silam. Kini, dengan pendekatan diplomasi pula Turki ingin membangun citra internasional sebagai salah satu negara kunci di kawasan Timur Tengah dan terlibat aktif mengawal isu-isu strategis di kawasan.

Kata Kunci: Turki, UE, Diplomasi, Citra Negara

Pada 10 Desember 1999, saat KTT Uni Eropa digelar di Helsinki, Finlandia, Turki secara resmi diterima sebagai kandidat anggota UE. Namun demikian, sejauh ini, proses menuju keanggotaan tetap itu belum juga terpenuhi. Pemerintah Turki terus melakukan upaya intensif untuk memenuhi setiap persyaratan yang dibutuhkan, selain itu upaya diplomatis terus digencarkan. Lantas seperti apa upaya diplomatis itu. Ketika Turki secara resmi diterima menjadi calon anggota tetap sejumlah langkah progressif dilaksanakan pemerintah Turki untuk memenuhi segala kriteria. Beberapa perubahan terlihat signifikan seperti penghapusan hukuman mati, reformasi hukum

pidana dan pemberantasan korupsi. Selain itu pada aspek politik, program demokratisasi terus dilaksanakan, peran militer dalam politik diminimalisir.

Selain reformasi di dalam negeri, Turki dalam konteks kebijakan luar negeri kelihatannya juga mencoba melakukan reposisi peran dengan memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangganya, ketegangan dengan negara tetangga diharmonisasi ulang, misalnya dengan Armenia. Hubungan Turki-Armenia yang sempat mengalami kebekuan akibat krisis politik di Armenia yang kemudian membuat Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan negara itu. Dalam upaya melewati setiap hambatan upaya normalisasi hubungan kembali digencarkan. Secara tidak langsung boleh jadi forum Parlemen Eropa pada Februari 2009 lalu merupakan review atas sejumlah pencapaian-pencapaian Turki untuk keanggotaannya, dan hasilnya adalah bahwa Turki dianggap masih perlu waktu panjang untuk melakukan sejumlah perbaikan pada sektor-sektor yang dinilai belum maksimal. Parlemen Eropa melihat belum ada perkembangan signifikan.

Secara umum, Parlemen Eropa mengharapkan Turki melakukan sejumlah reformasi undang-undang, sebab hanya dengan demikian Turki bisa melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan ketentuan organisasi regional UE. Prasyarat untuk menjadi anggota tetap UE telah ditetapkan oleh para kepala negara dan pemerintah anggota UE dalam Copenhagen Criteria, sebuah traktat yang ditetapkan di Copenhagen, Denmark pada 1993. Dalam kriteria tersebut beberapa syarat utama untuk menjadi anggota adalah stabilitas institusional sebagai jaminan untuk demokrasi dan ketertiban negara hukum, untuk menjaga hak asasi manusia serta menjaga hak-hak minoritas.

Selanjutnya, dalam ketentuan tersebut diatur tentang posisi setiap negara kandidat harus menyesuaikan dengan sistem ekonomi pasar yang berlaku di UE, dalam ketentuannya, setiap negara yang menjadi anggota tunduk atas ketentuan bersama dalam sektor kebijakan ekonomi makro.

Dalam sebuah kesempatan Stefan Fule, ketua Komisi Perluasan Eropa, menilai Turki memang telah memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi anggota tetap tetapi masih memerlukan perjuangan panjang mengingat masih adanya hambatan, ia mencontohkan sebuah perumpamaan terkait hubungan Turki dengan negara tetangga Siprus, Yunani. Atau Turki-Armenia. Sehingga tugas-tugas tersebut harus melalui proses politik di parlemen dan *political will* dari parlemen Turki untuk melakukan sejumlah reformasi sejumlah Undang-Undang sebagaimana preskripsi komisi perluasan UE menjadi point penting pada level domestik.

Arti Penting UE bagi Turki

Uni Eropa (UE) bagi sebagian besar analisis dilihat sebagai salah satu pemain penting dalam percaturan ekonomi politik internasional. Organisasi kawasan yang menghimpun negara-negara di daratan Eropa ini perlahan tapi pasti menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam menata organisasinya, terlihat dengan sejumlah pergeseran paradigma politik kawasan. Perubahan dari Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) menjadi Uni Eropa menjadi cermin bahwa negara-negara Eropa melalui Uni Eropa ingin memperluas otoritasnya tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga hendak merambah sektor lain seperti pertahanan dan politik secara luas.

Dari sudut pandang ekonomi, UE sebagai sebuah organisasi regional otomatis memiliki pangsa pasar begitu besar, UE tentu saja menggiurkan setiap negara untuk bisa menjadi bagian dari UE atau melakukan kerjasama dengan UE. Dan pada kesempatan yang sama paradigma politik kawasan telah berubah drastis seiring dengan berakhirnya Perang Dingin (Fawcett dan Hurrell, 1995), tidak lagi terbatas oleh sekat-sekat ideologis, sehingga negara atau kawasan lebih fokus pada aspek geo-ekonomi ketimbang geo-politik.

Arti penting UE bagi Turki juga terlihat dengan posisi Turki yang berada di persimpangan antara kawasan Asia dan Eropa, pilihan untuk menjadi bagian dari organisasi UE atau yang sejenis menjadi pertimbangan penting untuk meningkatkan aktifitas kerjasama perdagangan. Pada saat bersamaan UE juga telah menjadi organisasi kawasan yang tumbuh dewasa dan memainkan peranan penting dalam pentas ekonomi politik internasional, sehingga ketika menjadi bagian dari organisasi ini terdapat keuntungan-keuntungan baik teknis maupun non-teknis. Secara teknis, negara-negara anggota otomatis terintegrasi ke dalam sistem perdagangan dan ekonomi, setiap kebijakan mengacu pada ketentuan bersama, pola manajemen relasional antara negara satu dengan negara lain dikembangkan berdasarkan pola-pola modern dan sehat bagi pertumbuhan sebuah negara. Secara non-teknis, integrasi dengan UE akan menumbuhkan kepercayaan diri sekaligus trust dari masyarakat internasional, karena UE telah memiliki *brand image* tersendiri di mata internasional, oleh karenanya label UE yang melekat pada sebuah negara akan menjadi nilai tambah (*added values*) saat berhubungan baik pada bidang ekonomi maupun politik dengan entitas lain, baik negara maupun organisasi kawasan.

Barangkali Turki merupakan salah satu contoh negara yang telah lama menghendaki untuk menjadi bagian dari UE. Bahkan, kalau melihat catatan sejarahnya, Turki sejak modernisasi ala Mustafal Kemal Attaturk telah mendambakan menjadi bagian dari komunitas Eropa, baik pada level makro maupun mikro. Walaupun dalam catatan sejarah Turki juga termasuk negara yang berperan dalam pendirian MEE, "...since the proclamation of the Turkish Republic in 1923, Turkey has become one of the few pluralist secular democracies in the Muslim world. The country began to gear its political, economic and social reforms towards those of Western Europe in the

eighteenth century and has since aligned itself closely by becoming a member of the UN, NATO, the OECD, the Council of Europe and (as an associate member) the Western European Union,” namun demikian, sejauh ini Turki memang belum mendapat persetujuan untuk menjadi anggota tetap UE, masih dalam tahap percobaan untuk kemudian secara bertahap diuji kelayakannya sebagai anggota tetap. Lantas seperti apa upaya Turki mempercepat proses keanggotaan tetap UE?

Upaya-upaya Diplomatik Turki

Upaya peninjauan telah diupayakan semisal pada tahun 1963 antara Turki dengan Komunitas Ekonomi Eropa, dengan penandatanganan sebuah perjanjian kerjasama ekonomi yang disebut dengan Ankara Treaty. Pada tahun 2005 ditandatangani Protokol Ankara. Sebuah protokol untuk melengkapi Kesepakatan Ankara, dimana kesepakatan perdagangan bebas antara Turki dengan UE diperluas dengan melibatkan 9 negara anggota baru UE termasuk didalamnya Siprus Yunani. Siprus termasuk wilayah sengketa antara Turki-Yunani, sehingga ada kecenderungan untuk menyebut daerah ini ke dalam dua term, Siprus Turki atau Siprus Yunani. Secara geografis memang Siprus berada di persimpangan wilayah kedua negara.

Pemerintah Turki memang sangat serius dalam pencalonan menjadi anggota tetap UE. Sehingga tidak heran jika isu ini merupakan salah satu isu menarik dalam setiap kali pelaksanaan pemilu. Partai yang kini berkuasa, Partai AKP, dalam pemilu 2002 memang secara tegas meletakkan keanggotaan Turki dalam UE sebagai program kerja. Selain itu, beberapa langkah diplomatik yang juga dipilih dan telah dilaksanakan pemerintah Turki untuk mencapai tujuan tersebut, sekaligus prasyarat yang tercantum dalam Copenhagen Criteria untuk calon anggota UE, di antaranya adalah:

- Mengurangi Peran Militer dalam dunia perpolitikan, dalam hal ini pemerintah Turki mengambil langkah progresif dengan melakukan reformasi untuk mengembalikan militer ke baraknya;
- Menghargai hak-hak minoritas seperti suku Kurdi, ditandai dengan diperbolehkannya menggunakan bahasa Kurdi dan perayaan tradisi Kurdi;
- Menghargai HAM, mengeluarkan sejumlah peraturan yang melindungi hak warga negara, isu jilbab termasuk yang menjadi sorotan publik UE, bagi UE jilbab merupakan bagian dari hak berkeyakinan yang harus dilindungi;
- Melakukan liberalisasi ekonomi sesuai standar UE;

Upaya-upaya di atas bisa diartikan merupakan bagian dari strategi domestik untuk

mencapai tujuan tertinggi. Memperbaiki institusi dalam negeri dan mengencarkan upaya-upaya strategis untuk sektor luar negeri. Secara garis besar, diplomasi yang dilakukan Turki dalam upaya menjadi anggota tetap UE tidak hanya terhenti pada melaksanakan butir-butir Copenhagen Criteria, tetapi lebih dari itu Turki sangat progresif dalam menggalang dukungan.

Adapun upaya-upaya Turki selain pada sektor dalam negeri adalah menggalang dukungan dari mitra atau patner yang dianggap mampu memberikan stimulus bagi upaya percepatan keanggotaan tetap UE. Beberapa contoh "manuver" itu diantaranya adalah, pertama, melobi negara mitra dagang, Perancis melalui Presiden Nicolas Sarkozy memang menolak Turki menjadi anggota UE dengan alasan Turki secara geografis berada di kawasan Asia. Tetapi hal ini mendapatkan tanggapan dari Kanselir Jerman, Angela Merkel yang menyatakan bahwa Turki sangat bisa menjadi anggota tetap UE, bahkan akan diberikan status anggota luar biasa "priveledge member". Turki sangat didukung oleh Jerman tidak terlepas dari faktor kedekatan Turki-Jerman, neraca perdagangan kedua negara sangat tinggi jika dibandingkan Turki-Perancis. Jumlah komunitas Turki di Jerman perlahan tapi pasti mengalami perkembangan signifikan, mereka kini adalah para kalangan menengah yang memiliki pengaruh—untuk menyebut salah satu contoh adalah Orhan Pamuk, seorang peraih Nobel sastra yang banyak menghabiskan waktunya di Jerman—, kedekatan kultural semacam ini tentu saja menjadi pertimbangan di tingkat elit.

Kedua, Turki memanfaatkan pengaruh Amerika Serikat di UE. AS-Turki merupakan sekutu pada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), bukti kedekatan itu adalah ketika Turki mengizinkan AS untuk menggunakan pangkalan militernya saat invasi AS ke Irak pada 2003, sehingga dalam banyak kesempatan Turki memanfaatkan kedekatan ini untuk mempercepat proses keanggotaan di UE. Selain itu, Turki saat mengalami krisis finansial pada awal tahun 2001 meminta bantuan AS untuk melunakkan hati para eksekutif di International Monetary Fund (IMF) agar Turki mendapat dana talangan.

Ketiga, penggalangan dukungan tidak terhenti pada negara-negara yang secara tradisional memiliki kedekatan dengan UE tetapi Turki juga mencoba melakukan komunikasi intensif dengan kekuatan-kekuatan baru dunia, Turki misalnya menjajaki kemungkinan-kemungkinan peningkatan kerjasama dalam term "strategic partnership" dengan Rusia. Kunjungan kenegaraan antar kedua negara menjadi simbol bahwa Turki memang mengharap dukungan dari Rusia. Rusia, melalui Presiden Dimitry Medvedev dan Perdana Menteri Vladimir Putin merespon niat baik Turki itu dengan menindaklanjuti dengan sejumlah langkah-langkah akomodatif, minimal dalam bentuk dukungan moral.

Keempat, memaksimalkan peran kebudayaan, Turki dianggap memiliki kekayaan warisan budaya sejarah, sehingga tidak heran kalau Turki merupakan salah satu destinasi penting wisata internasional. Corak kebudayaan Islam yang sempat mengalami kejayaan di negara itu menjadi keunggulan tersendiri di mata masyarakat Internasional, dan pada saat yang sama UE sendiri tengah melakukan langkah-langkah jangka panjang untuk menjadikan kawasan UE sebagai destinasi wisata kebudayaan dunia. Sehingga tidak heran kalau UE sangat konsern dengan hal-hal yang bersifat konservasi warisan kebudayaan dunia.

Kelima, para pelaku bisnis Turki juga berperan dalam mempromosikan Turki dalam hal *branding image* sebuah produk komersial, belakangan ada kecenderungan sejumlah pelaku bisnis di Turki meng-endorse kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, salah satunya adalah memposisikan diri sebagai negara penting dalam sejarah umat manusia dimana peradaban Islam pernah jaya dan bersinggungan dengan Eropa, kemudian memiliki ikon penting bernama Jalaludin Rumi, seorang ulama atau sufi besar yang sangat termasyhur di dunia Islam, bagi umat Islam Rumi adalah sosok ulama sufi yang memiliki pengaruh cukup besar yang mewarnai tradisi sufisme Islam dengan tarian melingkar khas Sufi yang dimilikinya. Bagi pelaku bisnis tarian sufi Rumi merupakan sesuatu yang "atraktif" dan memiliki arti penting bagi para wisatawan. Sekaligus mengandung nilai ekonomis. Pelaku bisnis ini mempromosikan Turki seakan telah menjadi anggota tetap UE, sehingga dalam iklan disebutkan bahwa Turki merupakan salah satu destinasi penting di jantung Eropa untuk wisata religius dan eksotisme sejarah masa lalu yang identik dengan Rumi serta masjid Biru.

Efektivitas Langkah Diplomasi Turki

Dari paparan di atas, kita bisa melihat apa yang dilakukan Turki dari persepektif teori diplomasi adalah negara mencoba memaksimalkan perannya dengan melakukan sejumlah negosiasi dan penggalangan dukungan dari berbagai pihak yang dianggap mampu membantu dalam mencapai tujuan-tujuan politik domestik.

Jika merujuk pada teori diplomasi Joseph Nye tentang "Soft Power" yang menggarisbawahi pentingnya *Soft Power* (SP) dalam dunia internasional seperti sekarang, unsur SP seperti "attractiveness" dalam bidang "culture, politics, dan policies atau institution" telah coba diintensifkan Turki. Pada aspek kebudayaan misalnya, dengan menonjolkan Turki sebagai negara penting dalam bidang pewaris peradaban besar bernama Islam, begitu juga ketika Turki menggalang dukungan kepada negara-negara pemain penting dalam pentas politik internasional sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, atau ketika Turki mengambil kebijakan-kebijakan penting dalam posisi sebagai negara yang dari ke hari mencoba memperbaiki reputasi institusinya sebagai yang siap menjadi bagian dari anggota tetap UE dengan

memenuhi setiap prasyarat yang diminta Parlemen UE baik yang terdapat dalam Copenhagen Criteria ataupun traktat pendukung lainnya.

Sama halnya dengan ketika mencoba mendeskripsikan kasus ini dengan pendekatan "Multi-track diplomacy" Louise Diamond, yang secara garis besar mengilustrasikan diplomasi sebagai sesuatu yang memiliki banyak sayap, banyak jalan, sehingga disebut dengan "multi", penggunaan multi memang menggambarkan betapa pentingnya mensinergikan semua aktor untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam kasus Turki peran pemerintah, pelaku usaha, kalangan budayawan, media massa, kalangan profesional, mereka semua seakan tengah mencoba menggapai sebuah mimpi dengan saling bahu membahu antara satu dengan yang lainnya.

Secara garis besar, diplomasi Turki memang sedikit banyak telah membuahkan hasil, terbukti dengan melunaknya satu per satu negara anggota UE untuk menerima Turki sebagai anggota tetap. Pembukaan ruang dialog intensif ketika Parlemen Eropa mengadakan sidang berkala terkait kemajuan sebuah negara, dalam hal ini Turki, menandakan keseriusan pada pihak UE yang juga memberi respon positif bagi keanggotaan tetap UE, meskipun masih memberikan catatan-catatan perbaikan pada sejumlah sektor yang dianggap fundamen, meminta melakukan reformasi sejumlah undang-undang misalnya.

Efektivitas diplomasi Turki juga terlihat dengan kecenderungan publikasi UE yang secara fair memosisikan Turki sebagai salah satu negara kandidat anggota tetap dengan meletakkan Turki di peta-peta promosi pariwisata dan memberikan catatan-catatan terkait sejumlah pencapaian Turki terkait keanggotaannya. Presiden Turki serta Perdana Menteri dalam beberapa kesempatan dilibatkan oleh UE ketika akan membahas sejumlah persoalan penting dan kebijakan-kebijakan makro UE, begitu juga dengan penempatan wakil Turki pada Parlemen Eropa yang bertugas menjadi delegasi dan perwakilan sebagaimana halnya posisi perwakilan sebuah negara di PBB, yang biasa disebut duta besar untuk PBB.

Kesimpulan

Turki boleh saja belum menjadi anggota tetap UE, akan tetapi upaya intensif untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak perlahan tapi pasti telah memberikan hasil signifikan. Diplomasi Turki mampu berjalan secara efektif tidak terlepas dari komitmen para pemangku kebijakan negara itu.

Langkah-langkah intensif yang oleh analis diplomasi diartikulasikan sebagai multi-track diplomasi atau cultural diplomacy ternyata mampu dimaksimalkan oleh pemerintah Turki sehingga berdampak positif bagi upaya terus menerus meraih tujuan domestik jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Berridge, G.R., *Diplomacy, Theory and Practice, Edisi Ketiga*, New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Kemmin, Jan Dirk dan Özlem Sandikci "Turkey's EU Accession as a Question of Nation Brand Image" dalam jurnal *Place Branding and Public Diplomacy* (2007) 3, 31-41.
- Walter, Jochen dan Mathias Albert, "Turkey on the European Doorstep: British and German Debates about Turkey in the European Communities," dalam *Journal of International Relations and Development* (2009) 12, 223-250. doi:10.1057/jird.2009.13.
- Können, Johanna "Cultural Diplomacy and the Debate on Turkey's Accession to the EU,"tt, (pdf).
- Nye, Joseph, *Soft Power: Meaning to Success in World Politics*, (New York: Public Affairs, 2004).
- Fawcett, Louise dan Andrew Hurrell, ed., *Regionalism in World Politics; Regional Organization and International Order*. London: Oxford University Press, 1995.
- Diamond, Louse "Peacemakers in a War Zone," Occasional Paper, The Institute for Multi-Track Diplomacy, Number 1 November 1993.
- Rofii, M. Sya'roni, *Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern 2001-2007*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Schimmelfennig, Frank "Entrapped again: The way to EU membership negotiations with Turkey," dalam *International Politics* (2009) 46, 413-431. doi:10.1057/ip.2009.5.
- "Turki dan Tiga Dilema Tak Terpecahkan," dalam <http://indonesian.tribe.ir/index.php/berita.html>, akses 05 Mei 2010.
- "Turki Kandidat Anggota "Abadi" Uni Eropa?," dalam http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,5434052,00.html, akses 05 Mei 2010.
- "Hubungan Turki dan Armenia Berharap Pada Diplomasi Sepakbola," dalam http://id.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-775/_nr-3/_lkm-4136/i.html, akses 10 Mei 2010.
- <http://www.palgravejournals.com/pb/journal/v3/n1/index.html#>